

KAJIAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PADA EMPAT BIDANG PRIORITAS DI KOTA JAYAPURA

Marsi Adi Purwadi¹
marsipurwadi@gmail.com

Mesak Ick²
imesakick@yahoo.com

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai dari kajian ini adalah: 1) mengidentifikasi dan mereview alokasi dan pemanfaatan dana Otsus pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; 2) mengidentifikasi dan mereview aspek perencanaan dan pengelolaan keuangan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus untuk peningkatan pelayanan pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; 3) mengukur keberhasilan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus Kota Jayapura untuk peningkatan pelayanan pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Data yang diperoleh dianalisis melalui: 1) analisis statistik deskriptif kuantitatif; 2) analisis studi kasus; 3) Content Analysis; 4) Concept Mapping. Selama kurun waktu 2008-2014, pemerintah Kota Jayapura telah melaksanakan 810 kegiatan yang pembiayaannya dialokasikan melalui dana Otonomi Khusus. Bidang Pendidikan adalah bidang pembiayaan dengan jumlah kegiatan terbanyak yang dibiayai oleh Dana Otonomi Khusus Kota Jayapura. Peningkatan Mutu, Pelayanan dan Non Formal adalah Sub Pembiayaan dengan jumlah kegiatan terbanyak yang dilaksanakan dengan menggunakan dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan, yaitu sebanyak 115 kegiatan. Kesehatan dasar adalah sub pembiayaan dengan jumlah kegiatan terbanyak yang dilaksanakan dengan menggunakan dana Otonomi Khusus Bidang Kesehatan, yaitu sebanyak 121 kegiatan. Komoditi unggulan adalah sub pembiayaan dengan jumlah kegiatan terbanyak yang dilaksanakan dengan menggunakan dana Otonomi Khusus Bidang Infrastruktur Dasar, yaitu sebanyak 13 kegiatan. Komoditi unggulan adalah sub pembiayaan dengan jumlah kegiatan terbanyak yang dilaksanakan dengan menggunakan dana Otonomi Khusus Bidang Ekonomi Kerakyatan, yaitu sebanyak 54 kegiatan. Bidang lainnya adalah bidang dengan pengalokasian dana Otonomi Khusus terbesar di Kota Jayapura yang mencapai 30.30 persen selama kurun waktu 2008-2014. Selain bidang tersebut, bidang pendidikan adalah bidang yang juga menerima alokasi dana Otsus yang cukup besar, sedangkan bidang bidang ekonomi, kesehatan dan infrastruktur, hanya mendapat alokasi dana Otsus yang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum adalah SKPD yang mengelola Dana Otonomi Khusus terbesar di Kota Jayapura, yang digunakan untuk melakukan pembangunan OAP melalui Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dasar, dan ekonomi kerakyatan, selama kurun waktu 2008-2014. Kapasitas Aparatur pada SKPD Pengelola Dana OTSUS, perlu memperoleh perhatian serius terkait efektifitas pengelolaan Kebijakan OTSUS di Kota Jayapura. Hal tersebut terindikasi dari hasil jawaban responden yang menyatakan bahwa: 1) terdapat kegiatan yang pelaksanaannya telah sesuai dengan pedoman yang ada, yang pelaksanaannya masih terdapat kegiatan yang penggunaan dananya cukup kecil; 2) Masih terdapat kegiatan yang dilakukan oleh SKPD dengan sedikit melibatkan OAP, dan berkontribusi rendah terhadap penyelesaian masalah-masalah OAP

Kata kunci: dana otonomi khusus, transparansi, akuntabilitas, kinerja pembangunan

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Papua berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 merupakan Jalan tengah yang ditawarkan oleh Pemerintah RI kepada seluruh Rakyat Papua atas permintaan untuk memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia. Kemauan Pemisahaan diri dari NKRI ini sudah mengkrystal sejak tahun 1962 dan telah menelan korban jiwa ribuan orang dan pada tahun 1999 secara resmi 350 orang tokoh Papua mewakili 260

¹ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

² Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN.

suku di Papua menghadap Presiaden RI di Istana Negara di Jakarta meminta untuk memisahkan diri (Merdeka). Alasan mendasar yang mendorong orang Papua ingin memisahkan diri dari NKRI adalah keterbelakangan di bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang infrastruktur dasar yang sangat timpang dari wilayah lain di Indonesia.

Permintaan orang Papua tersebut dikaji mendalam oleh Petinggi negara lalu mejawabnya melalui “Penyelenggaraan Otonomi Khusus di tanah Papua”. Pemerintah RI sangat percaya bahwa penyelenggaraan Otonomi Khusus di Papua akan mampu menyelesaikan akar permasalahan di bidang strategis yakni bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Guna mencapai tujuan penyelenggaraan Otonomi Khusus dimaksud, maka pemerintah pusat mengalokasikan dana yang sangat besar setiap tahun anggaran. Selama pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua, daerah ini telah menerima dana dalam jumlah besar. Terhitung Rp. 33,7 trilyun dana Otsus dan dana infrastruktur telah disalurkan ke daerah dalam kurun tahun 2002 - 2014. Bila digabung dengan Provinsi Papua Barat total dana mencapai Rp. 41,2 trilyun.

Dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran di Pemda Provinsi Papua, dana Otsus yang diterima dari Pemerintah didistribusikan 40 % untuk Provinsi Papua dan 60 % untuk kabupaten/kota. Sejak tahun 2014 alokasinya berubah 80% dikelola oleh kabupaten/kota dan 20% dikelola Provinsi Papua, direncanakan penggunaannya melalui program dan kegiatan pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan ketentuan: (1) tidak boleh dianggarkan bagi belanja aparatur – kecuali bagi aparatur yang langsung memberi pelayanan kepada warga, (2) dialokasikan untuk bidang pendidikan minimal 30%, bidang kesehatan minimal 15%, bidang infrastruktur, dan bidang perekonomian rakyat.

Khusus Kota Jayapura, sejak 2008 sampai 2014 mendapat alokasi dana Otsus Papua sebesar Rp 443.907.683.000, atau rata-rata per tahun sekitar Rp. 63.415.383.285,71 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 9.41% per tahun, dan proporsinya terhadap total Dana Otsus Papua sebanyak 3,63% per tahun.

Dana Otsus yang dialirkan dari Provinsi ke Kota Jayapura telah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan dan tuntutan pembangunan pelayanan publik bagi masyarakat Papua di Kota Jayapura. Banyak program pembangunan yang telah dilaksanakan Pemda Kota, dan warga kampung melalui RESPEK dan sekarang PROSPEK. Hasil-hasil pembangunan sudah terlihat di berbagai sudut-sudut kota terutama di 25 kelurahan dan 14 kampung yang ada di Kota Jayapura. Pembangunan prasarana dan sarana pelayanan pendidikan serta kesehatan terus dibangun. Prasarana infrastruktur dasar terus dibangun dan dipelihara, sehingga penduduk Orang Asli Papua (OAP) di kampung telah mulai mendapatkan pelayanan dasar walaupun ada beberapa yang belum maksimal.

Namun banyak isu menyatakan bahwa dana otsus di Kota Jayapura sepertinya tidak memberi dampak yang berarti bagi OAP. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bappeda Kota Jayapura bahwa: jika dilihat dari jangkauan, biaya transportasi dan aksesibilitas 14 kampung di kota Jayapura tidak ada masalah, namun dana otsus papua yang dialokasikan ke kota sepertinya tidak member dampak

terhadap kesejahteraan masyarakat di 14 kampung. Ini berarti ada masalah diproses awal mulai dari perencanaan, pengalokasian, dan pelaksanaan yang lebih ke pemerataan pengelolaan pada setiap SKPD, bukan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh OAP.

Semua fakta di atas kemudian menimbulkan tanda tanya dan keraguan masyarakat, yaitu “kemana uang otsus itu?” Kajian ini diarahkan untuk menjawab pengelolaan keuangan Otsus dalam bidang kesehatan dan pendidikan, dengan harapan bahwa hasil kajian nantinya akan dipublikasi untuk diketahui warga dan masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kajian ini adalah: 1) mengidentifikasi dan mereview alokasi dan pemanfaatan dana Otsus pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; 2) mengidentifikasi dan mereview aspek perencanaan dan pengelolaan keuangan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus untuk peningkatan pelayanan pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; 3) mengukur keberhasilan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus Kota Jayapura untuk peningkatan pelayanan pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan Studi

Secara garis besarnya pendekatan yang digunakan dalam studi ini terdiri atas dua bagian yakni pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dengan pendekatan kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis informasi yang dapat dikuantitatifkan atau data yang dapat diukur dan dimanipulasi misalnya dalam bentuk persamaan, tabel, grafik. Pendekatan kuantitatif dalam studi ini digunakan untuk: mempelajari berbagai kecenderungan, meramalkan dampak kebijakan yang diambil dan memperkirakan persoalan-persoalan yang potensial terjadi, serta menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan berbagai alternatif rencana yang akan diambil. Metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah statistik deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk membuat pencandraan atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Sedangkan pendekatan kualitatif adalah suatu proses dan pemahaman studi yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini dibuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari berbagai pandangan, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Adapun metoda yang diterapkan dalam pendekatan kualitatif kali ini adalah studi kasus yakni suatu studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Studi ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu.

2. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam studi ini meliputi data sekunder dan primer. Data sekunder merupakan sekumpulan data yang diperoleh, diliput dan dikumpulkan dari berbagai laporan yang telah dipublikasikan oleh sebuah institusi sebelumnya. Sedangkan data primer merupakan *raw data* atau data dasar yang langsung diliput pada obyek yang diamati melalui suatu teknik pengumpulan data tertentu.

Menurut sumbernya data yang dihimpun dalam studi ini dapat berasal dari instansi pemerintahan seperti BPS, Bappeda, Dinas Pendidikan, dan sebagainya. Atau yang bersumber pada lembaga-lembaga non pemerintah seperti lembaga-lembaga donor, LSM, asosiasi, dan organisasi lainnya.

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam kajian ini adalah: 1) wawancara mendalam. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya; 2) studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh sejumlah data sekunder serta berbagai kajian empiris yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur maupun laporan-laporan periodik (bulanan/ tahunan) yang tersedia pada obyek penelitian.

3. Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif Kuantitatif

Statistik deskriptif kuantitatif merupakan penerapan metode statistik untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data kuantitatif secara deskriptif. Kegiatan yang termasuk dalam kategori tersebut adalah kegiatan pengumpulan data, pengelompokan data, penentuan nilai dan fungsi statistik, serta yang terakhir termasuk pembuatan grafik dan gambar.

Dalam kajian ini statistik deskriptif kuantitatif berfungsi untuk menerangkan keadaan, gejala atau persoalan-persoalan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan Otsus, baik itu yang bersumber pada data-data sekunder maupun primer.

Analisis Studi Kasus

Analisis studi kasus dalam studi ini mengikuti saran Eisenhardt (1989, pp.539-543) yang mengenalkan dua tahap analisis, yaitu *content analysis* dan *cross-case analysis*. Dalam penelitian ini hanya digunakan analisis kasus terpisah (*within-case analysis*). Analisis ini dilakukan untuk setiap data yang terdapat dalam setiap kasus. *Within-case analysis* dilakukan dengan menggunakan *content analysis* untuk tiap satuan kasus (misalnya kasus penganggaran, kasus pelaksanaan, sampai dengan kasus dana RESPEK). Analisis ini belum membantu peneliti untuk menjeneralisasi atau membangun pengetahuan atau teori baru.

Content Analysis

Analisis isi yang digunakan studi ini adalah *qualitative content analysis* yang disebut oleh Hsieh & Shannon (2005) sebagai *summative content analysis*. *Qualitative content analysis* mempunyai fokus perhatian pada isi (makna) dari teks dalam konteksnya. Data yang digunakan bisa dalam bentuk lisan, tertulis, ataupun elektronik. Tahap analisis isi yang dilakukan penelitian ini adalah

(1) menghimpun informasi dari pemberitaan media *web*, (2) mengidentifikasi fenomena utama yang dipermasalahkan, (3) mendalami fenomena melalui pengamatan dan diskusi teman sejawat, (4) merumuskan fenomena utama pengelolaan Dana Otsus, dan (5) mengkategorikan fenomena dalam matriks analisis dimensi.

Concept Mapping

Concept mapping merupakan proses pemetaan konsep dalam bentuk diagram alur untuk membentuk pengertian dan makna yang utuh dari himpunan isu dan masalah yang terjadi dalam satu konteks. Ide pemetaan konsep ini banyak dipakai penelitian kualitatif karena dinilai berguna untuk merangkum data kualitatif - *reduce qualitative data* - (Novak, 1998). Daley (2002) menjelaskan bahwa dengan menggunakan *concept mapping*, data teks antara 40 sampai 50 halaman dapat dituangkan dalam satu lembar kertas saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sebaran Kegiatan Otonomi Khusus Kota Jayapura

Selama kurun waktu 2008-2014, pemerintah Kota Jayapura telah melaksanakan 810 kegiatan yang pembiayaannya dialokasikan melalui dana Otonomi Khusus. Selama kurun waktu tersebut, implementasi pelaksanaan Otonomi Khusus di Kota Jayapura telah menunjukkan kondisi yang baik. Hal tersebut terlihat dari banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura yang pembiayaannya dialokasikan melalui dana Otonomi Khusus, yang terdistribusi pada 29 SKPD pengelola Dana Otonomi Khusus.

Dinas Pendidikan adalah SKPD dengan jumlah kegiatan terbanyak, yaitu sebanyak 219 kegiatan, diikuti oleh Dinas Kesehatan dengan jumlah kegiatan sebanyak 147 kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa SKPD-SKPD yang memiliki keterkaitan dengan bidang prioritas yang diamanatkan oleh Kebijakan Otonomi Khusus, telah mendapatkan porsi yang besar.

Tabel 1.
Jumlah Kegiatan Yang Dibiayai Dana Otsus Kota Jayapura Menurut SKPD Tahun 2008-2014

No	SKPD	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
1	Dinas Pendidikan	26	35	33	25	37	47	16	219
2	Dinas Kesehatan	13	13	16	24	30	29	22	147
3	Badan Pemberdayaan Perempuan & KB	3	6	6	11	7	13	8	54
4	Dinas Pekerjaan Umum	3	7	5	9	6	12	8	50
5	Dinas Sosial	5	10	6	8	7	8	6	50
6	Dinas Pertanian				7	4	13	8	32
7	Badan Pemberd. Masy. & Pem. Kampung		2	5	4	3	11	6	31
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan & Koperasi	3	6	3	5	3	9		29
9	Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman	1	4	3	7	10	1	2	28
10	Dinas Kelautan Dan Perikanan			1	4	2	11	9	27
11	Sekretariat Daerah	6	1	4	5	4			20
12	Dinas Tenaga Kerja	6	2	3	3	1	2	2	19
13	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata			2	1	1	8	5	17
14	Kantor Ketahanan Pangan & Penyuluhan			1	3	1	7	3	15
15	Dinas Pemuda Dan Olahraga		3	2	1	2	5		13
16	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	6		2	3	1			12
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	1	1	1	1	1	1	8
18	Distrik Abepura	1	1	1	1	1			5

No	SKPD	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
19	Distrik Heram	1	1	1	1	1			5
20	Distrik Jayapura Selatan	1	1	1	1	1			5
21	Distrik Jayapura Utara	1	1	1	1	1			5
22	Distrik Muara Tami		1	1	1	1			4
23	Badan Kesbang, Politik Dan Linmas	1			2				3
24	Dinas Informasi Dan Komunikasi	2	1						3
25	Dinas Perhubungan				2	1			3
26	Dinas Kehutanan						2		2
27	Dinas Ketentraman Dan Ketertiban				2				2
28	Badan Lingkungan Hidup Daerah					1			1
29	Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah	1							1
Total		82	96	98	132	127	179	96	810

Sumber: Data diolah, 2015

Bidang Pendidikan adalah bidang pembiayaan dengan jumlah kegiatan terbanyak yang dibiayai oleh Dana Otonomi Khusus Kota Jayapura. Selama kurun waktu 2008-2014, pemerintah Kota Jayapura telah mengalokasikan dana Otonomi Khusus untuk peningkatan pembangunan bidang pendidikan terhadap Orang Asli Papua melalui 222 kegiatan. Bidang Perencanaan dan Monev adalah bidang pembiayaan yang jumlah kegiatannya terendah dengan jumlah 18 kegiatan.

Bidang infrastruktur selama kurun waktu tersebut, hanya dialokasikan dana untuk kegiatan sebanyak 26 kegiatan. Jumlah tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan bidang yang lain karena pada kurun waktu 2008-2013 belum ada ketentuan yang jelas tentang penggunaan dana Otonomi Khusus Bidang Infrastruktur, terutama pengkategorian infrastruktur yang wajib dibiayai oleh dana Otonomi Khusus.

Tabel 2.
Jumlah Kegiatan Yang Dibiayai Dana Otsus Kota Jayapura
Menurut Bidang Prioritas Tahun 2008-2014

No	Bidang Pembiayaan	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
1	Pendidikan	26	35	33	25	34	51	18	222
2	Kesehatan	18	15	18	28	32	29	24	164
3	Ekonomi Kerakyatan	5	10	11	24	14	39	23	126
4	Afirmasi	4	7	8	12	6	19	11	67
5	Infrastruktur Dasar	1	3	1	5	6	6	4	26
6	Perencanaan Dan Monev	2	2	2	1	5	5	1	18
7	Lainnya	26	24	25	37	30	30	15	187
Total		82	96	98	132	127	179	96	810

Sumber: Data diolah, 2015

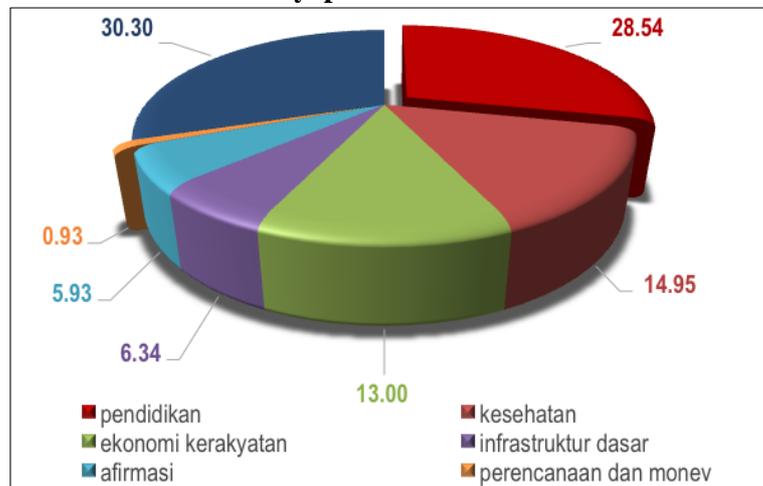
2. Alokasi Otonomi Khusus Kota Jayapura

Proporsi Belanja Otsus Dirinci Menurut Jenis Pembiayaan

Bidang lainnya adalah bidang dengan pengalokasian dana Otonomi Khusus terbesar di Kota Jayapura yang mencapai 30.30 persen selama kurun waktu 2008-2014. Bidang lainnya adalah bidang yang tidak termasuk dalam kriteria bidang yang diamanatkan dalam undang-undang Otonomi Khusus, namun bidang ini ada sebagai wujud dari upaya pemerintah daerah dalam mengupayakan pemerataan pembangunan di Kota Jayapura. Hal tersebut terlihat dalam pengimplementasian bidang ini juga

terdapat beberapa program/kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan Infrastruktur, namun bukan infrastruktur dasar.

Gambar 1.
Proporsi Pembagian Dana Otonomi Khusus Kota Jayapura Tahun 2008-2014



Sumber: Data diolah, 2015

Pemerintah Kota Jayapura telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk bidang pendidikan dalam pembangunan Orang Asli Papua. Hal ini terlihat dari pengalokasian dana Otonomi Khusus yang mencapai 28.54 persen selama kurun waktu 2008-2014. Sedangkan bidang ekonomi kerakyatan dan kesehatan adalah bidang dengan alokasi dana Otonomi Khususnya yang kurang dari 15 persen, dan bidang infrastruktur dasar hanya mencapai 6.34 persen. Untuk bidang afirmasi dan perencanaan & monitoring evaluasi adalah bidang dengan alokasi dana terkecil yang nilainya kurang dari 6 persen.

Dalam pengalokasian dana Otonomi Khusus tersebut, terlihat bahwa bidang-bidang prioritas yang merupakan bagian dari amanat Otonomi Khusus telah diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah Kota Jayapura. Hanya saja memang perlu dilakukan beberapa penyesuaian atas aturan-aturan pendukung yang baru diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam pengalokasian dan pemanfaatan dana Otonomi Khusus.

Rata-Rata Belanja Otsus Menurut SKPD

Dinas Pendidikan adalah SKPD yang mengelola dana Otonomi Khusus terbesar selama kurun waktu 2008-2014, yang mencapai Rp.104,228,438,932.-. Dinas Pendidikan memfokuskan pengalokasian dana Otonomi Khusus tersebut pada bidang pendidikan dan bidang perencanaan & monitoring evaluasi., yang masing-masing sebesar Rp.103,778,438,932.- dan Rp.450,000,000.-.

Pada tabel di bawah terlihat bahwa, terdapat banyak SKPD yang mengalokasikan dana Otonomi Khusus yang dikelola oleh SKPD-nya untuk hampir seluruh bidang pembiayaan. Seperti Dinas Pekerjaan Umum, yang mengalokasikan dana Otonomi Khusus dengan nilai mencapai

Rp.88,895,823,763.-, untuk bidang infrastruktur dasar, afirmasi, ekonomi kerakyatan, lainnya dan bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengalokasian dana Otonomi Khusus di Kota Jayapura, pemerintah Kota Jayapura lebih menekankan pada fungsi dari SKPD dalam pengimplementasian kebijakan Otonomi Khusus.

Pesebaran dana Otonomi Khusus pada hampir sebagian besar SKPD di lingkungan Pemerintahan Kota Jayapura juga dapat menimbulkan ketidak sinkronan dalam perencanaan, dimana dapat menimbulkan tumpang tindihnya kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan pada SKPD-SKPD yang ada. Dan hal ini juga menimbulkan ketidak efektifan dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus selama kurun waktu 2008-2014.

Tabel 3
Jumlah Dana Otsus Kota Jayapura Berdasarkan Bidang Pembiayaan
Menurut SKPD Tahun 2008-2014 (dalam juta rupiah)

SKPD	Afirmasi	Ekonomi Kerakyatan	Infrastruktur Dasar	Kesehatan	Lainnya	Pendidikan	Perencanaan Dan Money	Grand Total
Badan Kesbang, Politik Dan Linmas	-	-	-	-	310	-	-	310
Badan Lingkungan Hidup Daerah	-	-	-	-	350	-	-	350
Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung	445	175	-	-	16,980	-	461	18,061
Badan Pemberdayaan Perempuan Dan KB	3,594	523	-	709	200	-	50	5,076
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	275	-	-	275
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	2,321	2,321
Dinas Informasi Dan Komunikasi	-	-	-	-	570	-	-	570
Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman	-	-	5,785	-	5,337	-	-	11,122
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	5,000	-	389	-	36	-	-	5,425
Dinas Kehutanan	-	-	-	-	150	-	-	150
Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	4,013	-	-	200	-	100	4,313
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	250	1,847	-	-	2,097
Dinas Kesehatan	590	-	-	52,338	-	-	-	52,927
Dinas Ketentraman Dan Ketertiban	-	-	-	-	500	-	-	500
Dinas Pekerjaan Umum	6,386	18,044	13,428	-	49,838	1,200	-	88,896
Dinas Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	-	3,662	935	-	4,597
Dinas Pendidikan	-	-	-	-	-	103,778	450	104,228
Dinas Perhubungan	-	-	-	-	510	-	-	510
Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	-	10,795	-	-	-	-	-	10,795
Dinas Pertanian	200	5,667	-	-	200	-	-	6,067
Dinas Sosial	5,850	1,692	3,954	2,300	2,601	-	75	16,472
Dinas Tenaga Kerja	-	-	-	-	5,366	-	-	5,366
Distrik Abepura	-	-	-	-	3,250	-	-	3,250
Distrik Heram	-	-	-	-	3,250	-	-	3,250
Distrik Jayapura Selatan	-	-	-	-	3,250	-	-	3,250
Distrik Jayapura Utara	-	-	-	-	3,050	-	-	3,050
Distrik Muara Tami	-	-	-	-	2,600	-	-	2,600
Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan	-	2,409	-	-	-	200	-	2,609
Sekretariat Daerah	-	1,020	-	-	12,340	-	-	13,360
Total	22,064	44,338	23,556	55,597	116,671	106,113	3,457	371,796

Sumber: Data diolah, 2015

Belanja Otsus Bidang Pendidikan

Dinas Pendidikan adalah SKPD penerima alokasi dana terbesar dari pelaksanaan Otonomi Khusus di Kota Jayapura Bidang Pendidikan dengan dana senilai Rp.104,423,727,100.-. Jumlah

keseluruhan SKPD yang dialokasikan dana Otonomi Khusus oleh pemerintah Kota Jayapura dalam pengelolaan Bidang Pendidikan adalah sebesar Rp.106,758,727,100.-, yang dialokasikan untuk 4 SKPD, antara lain: 1) Dinas Pekerjaan Umum; 2) Dinas Pemuda Dan Olahraga; 3) Dinas Pendidikan; dan 4) Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan.

Tabel 4.
SKPD Pengelola Dana Otsus Kota Jayapura Menurut Bidang Pendidikan
Tahun 2008-2014 (Dalam Juta Rupiah)

SKPD	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Dinas Pekerjaan Umum	-	-	-	-	-	-	1,200	1,200
Dinas Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	-	-	935	-	935
Dinas Pendidikan	10,475	17,089	14,173	10,645	11,731	18,891	20,775	104,424
Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan	-	-	-	-	-	200	-	200
Total	10,475	17,089	14,173	10,645	11,731	20,026	21,975	106,759

Sumber: Data diolah, 2015

Belanja Otsus Bidang Kesehatan

Dinas Kesehatan adalah SKPD penerima alokasi dana terbesar dari pelaksanaan Otonomi Khusus di Kota Jayapura Bidang Kesehatan dengan dana senilai Rp.52,337,736,805.-. Jumlah keseluruhan SKPD yang dialokasikan dana Otonomi Khusus oleh pemerintah Kota Jayapura dalam pengelolaan Bidang Kesehatan adalah sebesar Rp.55,596,861,805.-, yang dialokasikan untuk 4 SKPD, antara lain: 1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB; 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 3) Dinas Kesehatan; dan 4) Dinas Sosial.

Tabel 5.
SKPD Pengelola Dana Otsus Kota Jayapura Menurut Bidang Kesehatan
Tahun 2008-2014 (Dalam Juta Rupiah)

SKPD	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Badan Pemberd. Perempuan & KB	-	200	30	330	49	-	100	709
Dinas Kepend. & Pencatatan Sipil	250	-	-	-	-	-	-	250
Dinas Kesehatan	6,088	6,136	5,817	6,942	7,757	8,857	10,742	52,338
Dinas Sosial	850	850	300	150	-	-	150	2,300
Total	7,188	7,186	6,147	7,422	7,806	8,857	10,992	55,597

Sumber: Data diolah, 2015

Belanja Otsus Bidang Ekonomi Kerakyatan

Dinas Pekerjaan Umum adalah SKPD penerima alokasi dana terbesar dari pelaksanaan Otonomi Khusus di Kota Jayapura Bidang Ekonomi Kerakyatan dengan dana senilai Rp.18,044,413,000.-. Jumlah keseluruhan SKPD yang dialokasikan dana Otonomi Khusus oleh pemerintah Kota Jayapura dalam pengelolaan Bidang Ekonomi Kerakyatan adalah sebesar Rp.44,337,743,963.-, yang dialokasikan untuk 9 SKPD, antara lain: 1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung; 2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB; 3) Dinas Kelautan dan Perikanan; 4) Dinas Pekerjaan Umum; 5) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi; 6) Dinas Pertanian; 7) Dinas Sosial; 8) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; dan 9) Sekertariat Daerah.

Tabel 6.
SKPD Pengelola Dana Otsus Kota Jayapura Menurut Bidang Ekonomi Kerakyatan Tahun 2008-2014 (Dalam Juta Rupiah)

SKPD	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung	-	-	-	-	-	175	-	175
Badan Pemberdayaan Perempuan Dan KB	75	75	100	-	-	273	-	523
Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	100	418	400	1,570	1,525	4,013
Dinas Pekerjaan Umum	-	1,700	5,424	3,510	3,510	1,950	1,950	18,044
Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	1,890	2,930	955	1,150	1,100	2,770	-	10,795
Dinas Pertanian	-	-	-	588	725	2,334	2,020	5,667
Dinas Sosial	150	342	150	100	-	-	950	1,692
Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan	-	-	200	500	100	975	634	2,409
Sekretariat Daerah	-	-	200	450	370	-	-	1,020
Total	2,115	5,047	7,129	6,716	6,205	10,047	7,079	44,338

Sumber: Data diolah, 2015

Belanja Otsus Bidang Infrastruktur Dasar

Dinas Pekerjaan Umum adalah SKPD penerima alokasi dana terbesar dari pelaksanaan Otonomi Khusus di Kota Jayapura Bidang Infrastruktur Dasar dengan dana senilai Rp.13,428,000,000.-. Jumlah keseluruhan SKPD yang dialokasikan dana Otonomi Khusus oleh pemerintah Kota Jayapura dalam pengelolaan Bidang Infrastruktur Dasar adalah sebesar Rp.23,556,040,000.-, yang dialokasikan untuk 4 SKPD, antara lain: 1) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman; 2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 3) Dinas Pekerjaan Umum; dan 4) Dinas Sosial.

Tabel 7.
SKPD Pengelola Dana Otsus Kota Jayapura Menurut Bidang Infrastruktur Dasar Tahun 2008-2014 (Dalam Juta Rupiah)

SKPD	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman	-	1,200	500	885	2,800	-	400	5,785
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	-	-	-	-	-	389	-	389
Dinas Pekerjaan Umum	-	676	-	-	5,000	450	7,302	13,428
Dinas Sosial	470	500	-	600	800	584	1,000	3,954
Total	470	2,376	500	1,485	8,600	1,423	8,702	23,556

Sumber: Data diolah, 2015

3. Penilaian Implementasi Otonomi Khusus

Dalam memotret kualitas perencanaan di tingkat SKPD maka terdapat beberapa ukuran yang digunakan, antara lain: (1) jumlah dana yang dikelola, (2) keterlibatan OAP dalam kegiatan, (3) kesesuaian dengan aturan dan pedoman yang berlaku, dan (4) pengaruhnya terhadap penyelesaian masalah-masalah OAP di Kota Jayapura.

Penggunaan Dana Otsus Terhadap Kesesuaian Dengan Pedoman Yang Ada

Kapasitas Aparatur pada SKPD Pengelola Dana OTSUS, perlu memperoleh perhatian serius terkait efektifitas pengelolaan Kebijakan OTSUS di Kota Jayapura. Dalam rangka implementasi dana Otonomi Khusus (OTSUS) terdapat beberapa hal penting yang perlu di perhatikan terkait menguraikan kebijakan OTSUS kedalam sebuah satuan terkecil yakni dalam bentuk kegiatan yang didanai oleh OTSUS. Adapun azas kepatutan yang dapat menjadi salah satu pedoman dalam mencermati perencanaan kegiatan OTSUS antara lain sebagai berikut:

Azas Kepatutan Dalam Perencanaan Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) di Kota Jayapura

Asas Kepatutan 1	Kegiatan-Kegiatan Yang Pelaksanaan Keempatannya Sesuai Dengan Pedoman Yang Ada Harus Mendapat Porsi Dana Yang Lebih Rutin Setiap Tahun.
Asas Kepatutan 2	Kegiatan-Kegiatan Yang Pelaksanaan Keempatannya Cukup Sesuai Dengan Pedoman Yang Ada Harus Mendapat Porsi Dana Yang Jarang Setiap Tahun.
Asas Kepatutan 3	Kegiatan-Kegiatan Yang Pelaksanaan Keempatannya Tidak Sesuai Dengan Pedoman Yang Ada Harus Mendapat Porsi Dana Yang Lebih Jarang, Bahkan Sebaiknya Tidak Perlu Diberikan.

Terdapat kegiatan yang pelaksanaannya telah sesuai dengan pedoman yang ada, yang pelaksanaannya masih terdapat kegiatan yang penggunaan dananya cukup kecil. Berdasarkan azas yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa sepatutnya seluruh kegiatan yang bersumber dari dana OTSUS Kota Jayapura yang pemanfaatannya telah sesuai dengan pedoman/aturan yang ada sudah semestinya dapat diberikan dana secara lebih rutin. Dimana secara keseluruhan terdapat 54 kegiatan yang penggunaan dananya tergolong besar dan telah dilaksanakan oleh SKPD dengan berpedoman pada aturan yang ada. Dan hanya sebanyak 4 kegiatan yang pemanfaatan dana OTSUS-nya kecil namun tetap berpedoman sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tabel 8.
Pengaruh Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Berdasarkan Pedoman Yang Ada Dengan Dana Yang Digunakan dirinci Menurut SKPD Pengelola Dana Otonomi Khusus (OTSUS) di Kota Jayapura

SKPD	Besar	Cukup Besar	Kecil	Grand Total
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah		1		1
Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah		1		1
Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman	5	2		7
Dinas Kelautan Dan Perikanan		3		3
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		4		4
Dinas Pendidikan	31	18		49
Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Komunikasi		1		1

SKPD	Besar	Cukup Besar	Kecil	Grand Total
Dinas Pertanian		9	2	11
Dinas Sosial	18	3		21
Dinas Tata Kota Dan Pertamanan			1	1
Dinas Tenaga Kerja		4		4
Distrik Muaralami			1	1
Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan		3		3
Grand Total	54	49	4	107

Sumber: Data diolah, 2015

Terdapat kegiatan yang pelaksanaannya cukup sesuai dengan pedoman yang ada, yang pelaksanaannya masih terdapat kegiatan yang penggunaan dananya cukup kecil. Berdasarkan azas yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa sepatutnya seluruh kegiatan yang bersumber dari dana OTSUS Kota Jayapura yang pemanfatannya tergolong cukup sesuai dengan pedoman/aturan yang ada sudah semestinya dapat diberikan dana yang jarang setiap tahun. Dimana secara keseluruhan terdapat 18 kegiatan yang penggunaan dananya tergolong besar dan telah dilaksanakan oleh SKPD cukup sesuai dengan berpedoman pada aturan yang ada. Dan hanya sebanyak 37 kegiatan yang pemanfaatan dana OTSUS-nya kecil namun tergolong cukup sesuai dengan pedoman/aturan yang berlaku.

Tabel 9
Pengaruh Kegiatan Cukup Sesuai Berdasarkan Pedoman Yang Ada Dengan Dana Yang Digunakan dirinci Menurut SKPD Pengelola Dana Otonomi Khusus (OTSUS) di Kota Jayapura

SKPD	Besar	Cukup Besar	Kecil	Grand Total
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		3		3
Badan Lingkungan Hidup	1			1
Badan Pemberd. Masyarakat & Pemerintahan Kampung		15		15
Badan Pemberd. Perempuan dan Keluarga Berencana		24	1	25
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	3		1	4
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata		11	2	13
Dinas Kelautan Dan Perikanan		11		11
Dinas Kesehatan	2	21	10	33
Dinas Pekerjaan Umum		8	11	19
Dinas Pemuda Dan Olahraga	1	7		8
Dinas Pendidikan	6	14		20
Dinas Perhubungan		1	6	7
Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Komunikasi		8		8
Dinas Pertanian		8		8
Dinas Pertanian (Bidang Kehutanan)			2	2
Dinas Sosial	1	1		2
Dinas Tata Kota Dan Pertamanan	1	3		4
Dinas Tenaga Kerja		2	4	6
Distrik Abepura	1			1
Distrik Jayapura Selatan		1		1
Distrik Jayapura Utara		1		1

SKPD	Besar	Cukup Besar	Kecil	Grand Total
Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan		5		5
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp)		2		2
Sekretariat Daerah	2	8		10
Sekretariat Daerah (Bagian Humas)		2		2
Grand Total	18	156	37	211

Sumber: Data diolah, 2015

Terdapat kegiatan yang pelaksanaannya kurang sesuai dengan pedoman yang ada, yang juga pelaksanaannya masih terdapat kegiatan yang penggunaan dananya cukup kecil. Berdasarkan azas yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa sepatutnya seluruh kegiatan yang bersumber dari dana OTSUS Kota Jayapura yang pemanfatannya tergolong kurang sesuai dengan pedoman/aturan yang ada sudah semestinya mendapat porsi dana yang lebih jarang setiap tahun. Dan hanya sebanyak 3 kegiatan yang pemanfaatan dana OTSUS-nya kecil namun juga tergolong kurang sesuai dengan pedoman/aturan yang berlaku.

Tabel 10.
Pengaruh Kegiatan Kurang Sesuai Berdasarkan Pedoman Yang Ada Dengan Dana Yang Digunakan dirinci Menurut SKPD Pengelola Dana Otonomi Khusus (OTSUS) di Kota Jayapura

SKPD	Besar	Cukup Besar	Kecil	Grand Total
Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman			3	3
Grand Total			3	3

Sumber: Data diolah, 2015

Penyelesaian Masalah OAP Terhadap Keterlibatan OAP Pada Kegiatan

Dalam rangka implementasi dana Otonomi Khusus (OTSUS) terdapat beberapa hal penting yang perlu di perhatikan terkait menguraikan kebijakan OTSUS kedalam sebuah satuan terkecil yakni dalam bentuk kegiatan yang didanai oleh OTSUS. Adapun azaz kepatutan yang dapat menjadi salah satu pedoman dalam mencermati perencanaan kegiatan OTSUS antara lain sebagai berikut:

Azas Kepatutan Dalam Perencanaan Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) di Kota Jayapura

Asas Kepatutan 1	Kegiatan-Kegiatan Yang Pelaksanaan Kegiatannya Banyak Melibatkan OAP Harus Mendapat Perhatian Yang Besar Untuk Dilaksanakan Karena Mampu Menyelesaikan Masalah-Masalah OAP
Asas Kepatutan 2	Kegiatan-Kegiatan Yang Pelaksanaan Kegiatannya Cukup Banyak Melibatkan OAP Harus Mendapat Perhatian Yang Secukupnya Untuk Dilaksanakan Karena Mampu Menyelesaikan Masalah-Masalah OAP
Asas Kepatutan 3	Kegiatan-Kegiatan Yang Pelaksanaan Kegiatannya Sedikit Melibatkan OAP Harus Mendapat Perhatian Yang Tidak Terlalu Besar Untuk Dilaksanakan Karena Tidak Mampu Menyelesaikan Masalah-Masalah OAP

Masih terdapat kegiatan yang dilakukan oleh SKPD dengan banyak melibatkan OAP, namun berkontribusi rendah terhadap penyelesaian masalah-masalah OAP. Berdasarkan azas yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa sepatutnya seluruh kegiatan yang bersumber dari dana OTSUS Kota Jayapura yang pemanfatannya melibatkan banyak OAP sudah semestinya harus mendapat porsi yang besar untuk dilaksanakan karena telah dianggap mampu menyelesaikan masalah-masalah OAP. Secara keseluruhan terdapat 13 kegiatan yang pelaksanaan kegiatannya telah dilaksanakan oleh SKPD dengan melibatkan banyak OAP dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan OAP. Namun terdapat 7 kegiatan yang dalam pelaksanaannya banyak melibatkan OAP, tetapi berpengaruh rendah terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh OAP.

Tabel 11.
Pengaruh Kegiatan Yang Banyak Melibatkan OAP Dengan Penyelesaian Masalah OAP dirinci Menurut SKPD Pengelola Dana Otonomi Khusus (OTSUS) di Kota Jayapura

SKPD	Rendah	Sedang	Tinggi	Grand Total
Badan Pemberd. Masyarakat & Pemerintahan Kampung		2		2
Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman		1	5	6
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata		2		2
Dinas Pendidikan	7	6	2	15
Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Komunikasi		2		2
Dinas Pertanian			1	1
Dinas Sosial		6	4	10
Dinas Tata Kota Dan Pertamanan			1	1
Dinas Tenaga Kerja		1		1
Grand Total	7	20	13	40

Sumber: Data diolah, 2015

Masih terdapat kegiatan yang dilakukan oleh SKPD dengan cukup banyak melibatkan OAP, namun berkontribusi rendah terhadap penyelesaian masalah-masalah OAP. Berdasarkan azas yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa sepatutnya seluruh kegiatan yang bersumber dari dana OTSUS Kota Jayapura yang pemanfatannya melibatkan cukup banyak OAP sudah semestinya harus mendapat perhatian yang secukupnya untuk dilaksanakan karena telah dianggap mampu menyelesaikan masalah-masalah OAP. Secara keseluruhan terdapat 14 kegiatan yang pelaksanaan kegiatannya telah dilaksanakan oleh SKPD dengan melibatkan cukup banyak OAP dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan OAP. Namun terdapat 40 kegiatan yang dalam pelaksanaannya cukup banyak melibatkan OAP, tetapi berpengaruh rendah terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh OAP.

Tabel 12.
Pengaruh Kegiatan Cukup Banyak Melibatkan OAP Dengan Penyelesaian Masalah OAP
dirinci Menurut SKPD Pengelola Dana Otonomi Khusus (OTSUS) di Kota Jayapura

SKPD	Rendah	Sedang	Tinggi	Grand Total
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2	1		3
Badan Lingkungan Hidup		1		1
Badan Pemberd. Masyarakat & Pemerintahan Kampung		13		13
Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana		25		25
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah		1		1
Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah		1		1
Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman		6		6
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata		10		10
Dinas Kelautan Dan Perikanan		12		12
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		4		4
Dinas Kesehatan		33		33
Dinas Pekerjaan Umum		14	5	19
Dinas Pemuda Dan Olahraga		7	1	8
Dinas Pendidikan	30	18		48
Dinas Perhubungan		3	4	7
Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Komunikasi	2	5		7
Dinas Pertanian		15	2	17
Dinas Pertanian (Bidang Kehutanan)		2		2
Dinas Sosial		13		13
Dinas Tata Kota Dan Pertamanan	1	2	1	4
Dinas Tenaga Kerja	5	4		9
Distrik Abepura		1		1
Distrik Jayapura Selatan		1		1
Distrik Jayapura Utara		1		1
Distrik Muararati		1		1
Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan		7	1	8
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp)		2		2
Sekretariat Daerah		10		10
Sekretariat Daerah (Bagian Humas)		2		2
Grand Total	40	215	14	269

Sumber: Data diolah, 2015

Masih terdapat kegiatan yang dilakukan oleh SKPD dengan sedikit melibatkan OAP, dan berkontribusi rendah terhadap penyelesaian masalah-masalah OAP. Berdasarkan azas yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa sepatutnya seluruh kegiatan yang bersumber dari dana OTSUS Kota Jayapura yang pemanfaatannya melibatkan sedikit OAP sudah semestinya harus mendapat perhatian yang tidak terlalu besar atau bahkan tidak perlu lagi untuk dilaksanakan karena tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah OAP. Dimana terdapat 7 kegiatan yang dalam pelaksanaannya hanya sedikit melibatkan OAP, dan berpengaruh rendah terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh OAP.

Tabel 13.
Pengaruh Kegiatan Sedikit Melibatkan OAP Dengan Penyelesaian Masalah OAP dirinci Menurut SKPD Pengelola Dana Otonomi Khusus (OTSUS) di Kota Jayapura

SKPD	Rendah	Sedang	Tinggi	Grand Total
Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman	1	1		2
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata		1		1
Dinas Kelautan Dan Perikanan	1	1		2
Dinas Pendidikan	5	1		6
Dinas Pertanian		1		1
Grand Total	7	5		12

Sumber: Data diolah, 2015

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan tujuan pelaksanaan kajian alokasi dana Otonomi Khusus pada empat bidang prioritas di Kota Jayapura, sebagai dasar perbaikan bagi kinerja aparatur dalam implementasi program dan kegiatan yang di biayai melalui dana Otonomi Khusus pada tahun-tahun yang akan datang. Maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Selama kurun waktu 2008-2014, pemerintah Kota Jayapura telah melaksanakan 810 kegiatan yang pembiayaannya dialokasikan melalui dana Otonomi Khusus. Bidang Pendidikan adalah bidang pembiayaan dengan jumlah kegiatan terbanyak yang dibiayai oleh Dana Otonomi Khusus Kota Jayapura. Peningkatan Mutu, Pelayanan dan Non Formal adalah Sub Pembiayaan dengan jumlah kegiatan terbanyak yang dilaksanakan dengan menggunakan dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan, yaitu sebanyak 115 kegiatan.

Kesehatan dasar adalah sub pembiayaan dengan jumlah kegiatan terbanyak yang dilaksanakan dengan menggunakan dana Otonomi Khusus Bidang Kesehatan, yaitu sebanyak 121 kegiatan. Komoditi unggulan adalah sub pembiayaan dengan jumlah kegiatan terbanyak yang dilaksanakan dengan menggunakan dana Otonomi Khusus Bidang Infrastruktur Dasar, yaitu sebanyak 13 kegiatan. Komoditi unggulan adalah sub pembiayaan dengan jumlah kegiatan terbanyak yang dilaksanakan dengan menggunakan dana Otonomi Khusus Bidang Ekonomi Kerakyatan, yaitu sebanyak 54 kegiatan.

2. Bidang lainnya adalah bidang dengan pengalokasian dana Otonomi Khusus terbesar di Kota Jayapura yang mencapai 30.30 persen selama kurun waktu 2008-2014. Selain bidang tersebut, bidang pendidikan adalah bidang yang juga menerima alokasi dana Otsus yang cukup besar, sedangkan bidang bidang ekonomi, kesehatan dan infrastruktur, hanya mendapat alokasi dana Otsus yang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus.

Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum adalah SKPD yang mengelola Dana Otonomi Khusus terbesar di Kota Jayapura, yang digunakan untuk melakukan pembangunan OAP melalui Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dasar, dan ekonomi kerakyatan, selama kurun waktu 2008-2014.

3. Kapasitas Aparatur pada SKPD Pengelola Dana OTSUS, perlu memperoleh perhatian serius terkait efektifitas pengelolaan Kebijakan OTSUS di Kota Jayapura. Hal tersebut terindikasi dari hasil jawaban responden yang menyatakan bahwa: 1) masih terdapat kegiatan yang pelaksanaannya telah sesuai dengan pedoman yang ada, yang pelaksanaannya masih terdapat kegiatan yang penggunaan dananya cukup kecil; 2) masih terdapat kegiatan yang dilakukan oleh SKPD dengan sedikit melibatkan OAP, dan berkontribusi rendah terhadap penyelesaian masalah-masalah OAP

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penilaian dan penarikan kesimpulan tentang pengelolaan dana Otonomi Khusus Kota Jayapura, bahkan pula mempertimbangkan saran-saran dan berbagai masukan dari berbagai pihak, maka kami dapat menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Jayapura perlu ada kepatuhan dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 dan PERDASUS Nomor. 25 Tahun 2013 tentang pembagian dan pengelolaan dana Otonomi Khusus untuk Kabupaten dan Kota (Pasal 11 ayat 1). Kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh Dana OTSUS, perlu adanya transparansi kepada penerima manfaat tentang jumlah dana dan sumber dana yang diberikan ataupun digunakan dalam setiap kegiatan yang menggunakan dana OTSUS. Transparansi dapat dilakukan melalui penyampain secara langsung ataupun melalui surat resmi kepada pihak-pihak terkait pengguna dana OTSUS, pemberian tanda/cap/label.
Perlu adanya publikasi pencapaian program/kegiatan yang dibiayai oleh dana OTSUS, melalui surat kabar lokal, radio, stasiun TV, dan website resmi pemerintah daerah.
Perlunya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran (RPJPD, RPJMD, RKPD, LKPD, RTRW, RENSTRA, RENJA, LAKIP).
2. Pemerintah Kota Jayapura perlu menyusun Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang pembagian dan pengelolaan dana Otonomi Khusus Kota Jayapura, yang memuat tentang SKPD wajib yang dapat mengelola Dana Otsus Kota Jayapura. Dimana Peratura Daerah tersebut merupakan turunan dari PERDASUS NO. 25 Tahun 2013 tentang pembagian dan pengelolaan dana Otonomi Khusus kepada Kabupaten/kota di Provinsi Papua.
3. Program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana Otonomi Khusus di lingkup pemerinah Kota Jayapura dari tahun anggaran 2008-2014 yang dinilai masyarakat cukup bermanfaat bagi orang asli Papua (OAP), supaya perlu di perbaiki, baik secara manajemen kelembagaan dalam pengelola program dan masyarakat yang menjadi sasaran supaya lebih jelas.
Dalam Program/Kegiatan yang dibiayai melalui Dana Otonomi Khusus hendaknya diprioritaskan terhadap penyelesaian OAP, dengan melibatkan lebih banyak OAP pada setiap kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang hanya memiliki dampak yang kecil terhadap penyelesaian masalah-masalah OAP sebaiknya tidak perlu dilanjutkan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan memperhatikan visi-misi walikota dan berdampak langsung terhadap penyelesaian masalah-masalah OAP, perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Karena disamping pelaksanaannya telah sesuai dengan semangat Otonomi Khusus, kegiatan-kegiatan tersebut juga dapat mendorong pencapaian kinerja daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kota Jayapura 2012-2016.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan memperhatikan pedoman/aturan/juknis yang ditetapkan oleh pemerintah, yang menggunakan dana Otonomi Khusus, perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Karena disamping pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku, alokasi dana pada kegiatan-kegiatan tersebut juga telah diperuntukan sesuai dengan amanat Otonomi Khusus.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan memperhatikan pedoman/aturan/juknis yang ditetapkan oleh pemerintah, yang berdampak pada penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi OAP, perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Karena disamping pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku, kegiatan-kegiatan tersebut juga dapat mendorong pencapaian upaya penuntasan permasalahan yang dihadapi oleh OAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rahab, A. 2008. "Majelis Rakyat Papua : Pilar Ketiga Penyelenggaraan Pemerintahan di Papua", dalam MRP Kitong Pu Honai, Mambor (ed.) Jayapura: Foker LSM Papua.
- Bappeda Provinsi Papua. 2007. Evaluasi Pelaksanaan Lima Tahun Otonomi Khusus Papua, manuskrip. Universitas Cenderawasih, Jayapura.
- Bappeda Provinsi Papua. 2009a. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program PPD Respek 2007 Dan PNPM Mandiri Respek 2008 Provinsi Papua. Bappeda Pemda Provinsi. Tidak dipublikasi.
- Bappeda Provinsi Papua. 2009b. Studi Dampak RESPEK Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kampung. Bappeda. Tidak dipublikasi.
- Bappenas. 2010. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Papua Tahun 2010. Kerjasama dengan Uncen.
- BPS dan Bappeda Kota Jayapura. 2015. Kota Jayapura Dalam Angka Tahun 2010-2014. Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Jayapura, Jayapura.
- BPS Kota Jayapura. 2015. PDRB Kota Jayapura 2008-2014. Badan Pusat Statistik Daerah Kota Jayapura
- Daley, B. (2002). The Scholarship of Teaching and Learning: Facilitating Adult Learning. *Journal of the Scholarship of Teaching and Learning*, 3,1, 14-24.
- Eisenhardt, K., "Building theories from case study research." *Academy of management review*, 14(4), 1989, pp. 532-550.
- Hsieh, H.-F., & Shannon, S.E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15 (9), 1277-1288.
- Novak, J. (1998). *Learning, creating and using knowledge: Concept Maps™ as facilitative tools in schools and corporations*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

- Sinta W & Eko BS; Otonomi Khusus dan Dinamika Perekonomian di Papua, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol.4, No.1, Januari – Juni 2013.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
- Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Khusus Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua
- Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jayapura Periode Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura;
- Peraturan Daerah Kota Jayapura, Nomor 20 Tahun 2011, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jayapura Periode Tahun 2012-2016